



**PENGARUH PDRB DAN PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH) TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN
(SWP) IV JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh

**Nurul Amalia Ulfa
NIM :110810101176**

**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PENGARUH PDRB DAN PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH) TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN
(SWP) IV JAWA TIMUR**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Nurul Amalia Ulfa
NIM : 110810101176**

**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas limpahan cinta dan kasih sayang-Mu serta sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan kekuatan, serta membekali dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada:

1. Ayahanda Sunhaji Manshur (Alm) dan Ibunda Mutmainah tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, bimbingan, pengorbanan dan motivasi yang tidak akan bisa tergantikan oleh apapun.
2. Kakakku tersayang Siti Halimatul Ulfa dan adikku Muhammad Daniel Alfaro yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi serta keluarga besar lainnya.
3. Bapak/Ibu Guru pendidik yang telak mengiringi dan membimbing dengan penuh kesabaran mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi.
4. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember

MOTTO

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,
tetapi bagaimana kita bangkit kembali setelah kita jatuh“
(Confusius)

“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan dan
saya percaya pada diri saya sendiri”
(Muhammad Ali)

“Bila andaberanibermimpitentangsuksesberartiandasudahmemegangkuncikesukses
hanyatinggalberusahamencarilubangkuncinya
untukmembukagerbangkesuksesan”
(John Capique Capone)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Nurul Amalia Ulfa

NIM : 110810101176

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "Pengaruh PDRB dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur "adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Oktober 2015

Yang menyatakan,

Nurul Amalia Ulfa
NIM 110810101176

SKRIPSI

**PENGARUH PDRB DAN PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH) TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN(SWP)
IV JAWA TIMUR**

Oleh

Nurul Amalia Ulfa
NIM 110810101176

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr.Teguh Hadi Priyono SE, M.Si

Dosen Pembimbing II : Dra. Sebastiana Viphindartin M.Kes

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh PDRB dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur
Nama : Nurul Amalia Ulfa
Nim : 110810101176
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Regional
Tanggal Persetujuan : 19 Oktober 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Teguh Hadi Priyono SE, M.Si
NIP 197002061994031002

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes
NIP 196411081989022001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes
NIP 196411081989022001

PENGESAHAN**Judul Skripsi**
PENGARUH PDRB DAN PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH)
TERHADAPTINGKAT KEMISKINAN DI SATUAN WILAYAH
PENGEMBANGAN(SWP) IV JAWA TIMUR

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nurul Amalia Ulfa

NIM : 110810101176

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:
13 November 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs. Agus Luthfi M.Si (.....)
NIP 196505221990021001
2. Sekretaris : Fivien Muslihatinningsih S.E, M.Si (.....)
NIP 198301162008122001
3. Anggota : Dr. Moh. Adenan M.M (.....)
NIP 196610311992031001
4. Pembimbing I : Dr. Teguh Hadi Priyono S.E, M.Si (.....)
NIP 1970020619940311002
5. Pembimbing II : Dr. Sebastiana Viphindartin M.Kes (.....)
NIP 196411081989022001

Foto 4 X 6
warna

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad. Fathorrazi, SE., M.Si
NIP. 19630614 1 199002 1 001

Pengaruh PDRB dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur

Nurul Amalia Ulfa

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB dan PAD terhadap tingkat kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur. Data yang digunakan adalah PDRB atas harga konstan, realisasi PAD dan data kemiskinan atas dasar jumlah penduduk miskin tahun 2000-2013 bersumber dari Badan Pusat Statistik. Pada penelitian ini untuk mengetahui hasil rumusan masalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan model panel data dan menggunakan pendekatan Fixed Effect. Hasil analisis membuktikan bahwa PDRB dan PAD signifikan dengan elastisitas negatif terhadap kemiskinan. dengan adanya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PDRB dan PAD akan diikuti dengan adanya penurunan tingkat kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur.

Kata Kunci : Tingkat Kemiskinan, PDRB dan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

***The Influence of GDP and PAD (Regional Income) to the Poverty Level in (SWP)
IV East Java***

NurulAmaliaUlfa

*Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics,
Jember University*

ABSTRACT

Background this research is to know how the influence of GDP and PAD (regional income) to the poverty level in the Regional Unit Development (SWP) IV East Java . The data used is GDP at constant prices , the realization of revenue and poverty data based on the number of poor people in 2000-2013 came from the Central Bureau of Statistics (BPS). The purpose of this research is to know the result of hypothesis by using panel data analysis method and by using fixed effect approach. In conclusion GDP and PAD (regional income) influence. In conclusion, GDP is negative and significant to the poverty level but PAD (regional income) negative influences insignificant to the poverty level poverty in the Regional Unit Development (SWP) IV East Java . Results of the analysis proved that GDP and significant PAD with negative elasticity against poverty. the presence of these effects suggests that the increase in GDP and the PAD will be followed by a decrease in the level of poverty in the Regional Unit Development (SWP) IV East Java .

Keywords : Poverty Level, GDP and PAD (Regional Income)

RINGKASAN

Pengaruh PDRB dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur; Nurul Amalia Ulfa, 110810101176; 2015: 77 Halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial tingkah laku sosial, dan institusi sosial, di samping itu akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi merupakan dua tujuan pembangunan yang seharusnya dapat dicapai secara bersamaan dalam proses pembangunan ekonomi. Maka tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB dan PAD terhadap tingkat kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur pada tahun 2000-2013. Model yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel dengan menggunakan fix effect (*Fixed Effect Model*). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan data 3Kabupaten/Kota yaitu Jember, Bondowoso dan Situbondo yang berada di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV di Provinsi Jawa Timur.

Hasil pengujian regresi analisis data panel dilakukan pada model Fixed effect, secara bersama-sama (uji F) terdapat pengaruh signifikan dengan elastisitas negatif dari variabel produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan (KM) dengan probabilitas f-statistik 0,000000 sedangkan pada (uji F) yang dilakukan secara bersama – sama terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap tingkat kemiskinan (KM) dengan probabilitas f-statistik

0.8829. Dengan kata lain, pengaruh signifikan dengan elastisitas negatif PDRB dan PAD menunjukkan bahwa meningkatnya atau menurunnya produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah tidak diikuti pula dengan meningkat atau menurunnya tingkat kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Provinsi Jawa Timur. Hasil uji t variabel PDRB t-statistik sebesar -7.220492 lebih besar dari t-tabel 0,05% mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan, nilai t-statistik pendapatan asli daerah (PAD) sebesar -0.148371 dari t-tabel 0,05% maka PAD tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur. Hasil koefisien determinasi (Adjusted R-square) sebesar 0.895723, hal ini berarti 89,57 persen total variasi tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur dan sisanya 10,43 persen dipengaruhi variabel lain di luar penelitian.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pengaruh PDRB dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur*”. Skripsi ini disusun bertujuan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini, tentunya tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Teguh Hadi Priyono SE, M. Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan mendampingi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Dra. Sebastiana Viphindartin M. Kes selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan mendampingi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Dr. M. Fathorrazi, SE., M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
5. Abahku Sunhaji (Alm) dan Ibunda Mutmainnah yang selalu menemani, memberikan Do'a serta rasa cinta dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar;
6. Kakakku Siti Halimatul Ulfa dan Adekku Muhammad Daniel Alfaro terimakasih telah memberikan motivasi dan rasa cinta serta kasih sayangnya;
7. Sahabat-sahabatku Chandra, Bunga, Hasti, Winda, Asti, Rury, Inge, Adelia, Sri Sulastri yang selalu memberikan motivasi, keceriaan dan kasih sayangnya dan terimakasih buat kesetiannya;

8. Terimakasih buat Kamu yang sudah memberikan motivasi, semangat, kasih sayangnya, rasa cinta serta waktu dan doa terbaiknya kepada penulis;
9. Teman-teman angkatan IESP 2011 terimah kasih telah memberikan banyak saran dan motivasi dan juga teman-teman Konsentrasi Regional yang selalu memberikan dukungan dan semangat, keceriaan serta kasih sayang tanpa kalian aku tidak berarti, terimakasih semoga pertemanan kita tetap terjalin;
10. Teman-teman kosan Giant Lank Jl.Jawa 4A No 19A terimakasih telah memberikan tempat terryaman selama kuliah dan terimakasih juga buat dukungan dan keceriaan serta semangatnya;
11. Teman-temanku mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan gaes larva yang jauh yang tidak bisa kusebutkan satu persatu terimakasih atas pertemanannya semoga tetap terjalin dengan penuh keceriaan dan kasih sayang;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menyempurnakan hasil penulisan ini sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi sumber inspirasi bagi penulisan karya ilmiah yang sejenis di masa mendatang.

Jember, 19 Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMABAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
 BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.2 Teori Kemiskinan	12
2.1.3 Penyebab Kemiskinan	13
2.1.4 Ukuran dan Ciri-ciri Kemiskinan	15

2.1.5 Pemerintahan Daerah	17
2.1.6 Keuangan Daerah	18
2.1.7 Pendapatan Asli Daerah	20
2.1.8 Teori Pendapatan	21
2.1.9 Produk Domestik Regional Bruto	22
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Konseptual	28
2.4 Hipotesis	29
BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian.....	30
3.1.1 Jenis Penelitian.....	30
3.1.2 Unit Analisis	30
3.1.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.2.1 Jenis Data.....	31
3.2.2 Sumber Data	31
3.3 Metode Analisis Data	32
3.3.1 Analisis Regresi Panel Data	32
3.4 Uji Statistik	36
3.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	36
3.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	38
3.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)	38
3.5 Uji Asumsi Klasik	39
3.5.1 Uji Multikolinieritas	39
3.5.2 Uji Heterokedastisitas.....	39
3.5.3 Uji Autokorelasi	40
3.5.4 Uji Normalitas	41
3.6 Definisi Operasional Variabel	41

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum	43
4.1.1 Letak Geografis.....	43
4.1.2 Kondisi Perekonomian di masing-masing Kabupaten dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV JawaTimur	46
4.1.3 Gambaran Jumlah Penduduk dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur	48
4.1.4 Gambaran Kondisi Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur	49
4.1.5 Gambaran Kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur	51
4.1.6 Gambaran Kondisi Pendapatan Asli Daerah PAD di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur	52
4.2 Analisis Data.....	53
4.2.1 Hasil Uji Hausman Test.....	53
4.2.2 Analisis Regresi Data Panel.....	54
4.2.3 Uji Statistik	56
4.2.4 Uji Asumsi Klasik	58
4.3 Pembahasan	61
4.6.1 Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	62
4.6.2 Pengaruh PAD Terhadap Tingkat Kemiskinan	63

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

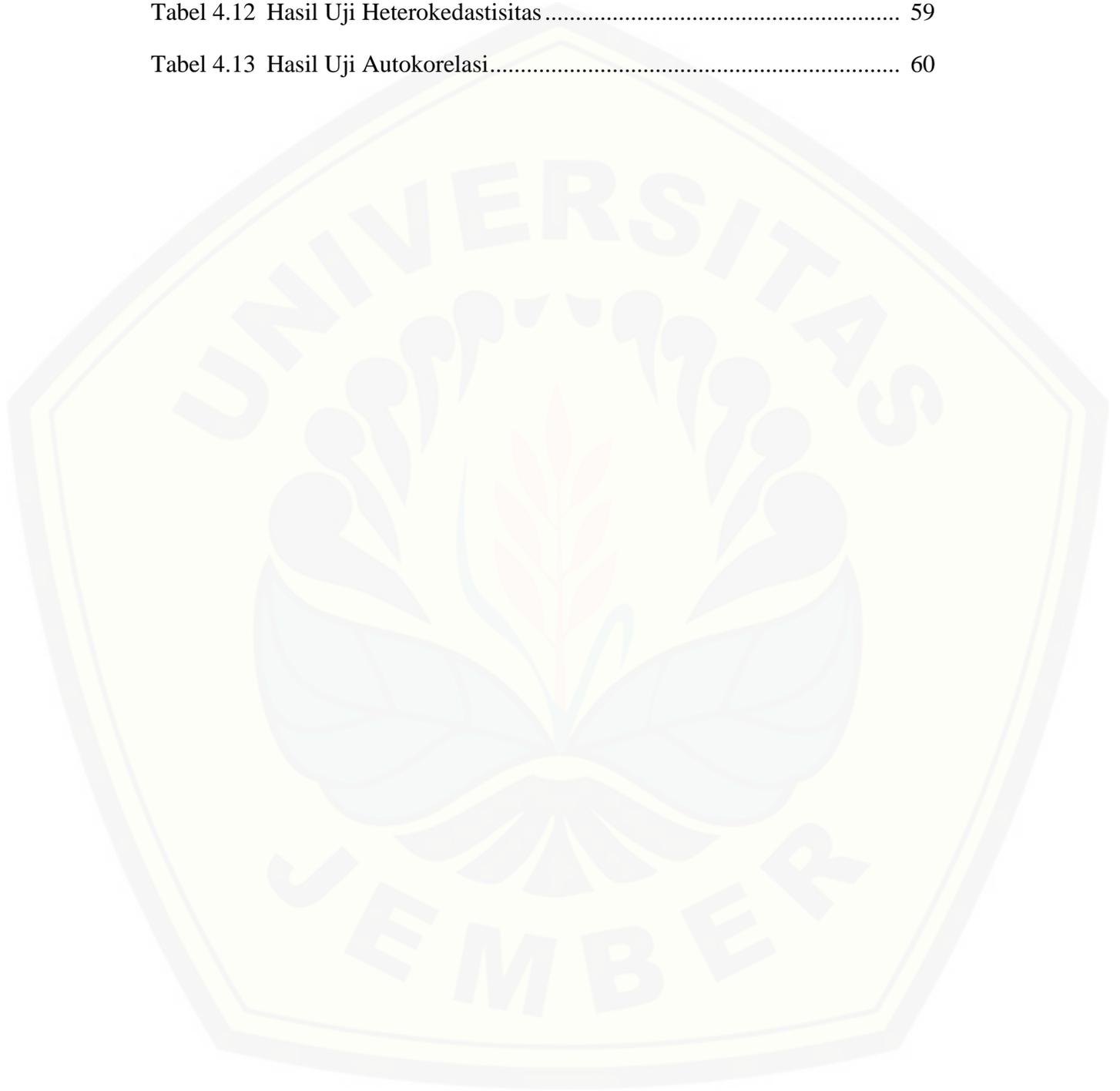
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 PAD Perkapita Kabupaten/Kota 2008-2013)	4
Tabel 1.2 PDRB Perkapita Kabupaten/Kota 2008-2013.....	6
Tabel 1.3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota 2008-2013.....	6
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Kriteria Pengujian Durbin Watson	40
Tabel 4.1 PDRB Perkapita Kabupaten dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur 2008-2013	48
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur Tahun 2003-2013	49
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten dalam SWP IV Jawa Timur Periode Tahun 2000-2013	50
Tabel 4.4 Perkembangan PDRB di SWP IV Jawa Timur Tahun 2000-2013	51
Tabel 4.5 Jumlah PAD di SWP IV Jawa Timur Tahun 2000-2013	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman Test	53
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Data Panel dengan Pendekatan Fixed Effect	54
Tabel 4.8 Hasil Uji F	56
Tabel 4.9 Hasil Uji t-statistik	57
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	58

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolenearitas 59

Tabel 4.12 Hasil Uji Heterokedastisitas 59

Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi..... 60



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan	14
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	28
Gambar 3.1 Uji Durbin Watson	40
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Jember	43
Gambar 4.2 Peta Kabupaten Bondowoso	45
Gambar 4.3 Peta Kabupaten Situbondo	46
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas	61

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Penelitian.....	70
Lampiran B Hasil Uji Hausman Test	72
Lampiran C Hasil Analisis Regresi Data Panel dengan Pendekatan Fixed Effect.....	73
Lampiran D Hasil Uji F (Uji F Secara Bersama-sama)	74
Lampiran E Hasil Uji t-Statistik (Parsial).....	74
Lampiran F Hasil Uji R^2 (Determinasi)	74
Lampiran G Hasil Uji Multikoleniaritas	75
Lampiran H Hasil Uji Heterokedastisitas	75
Lampiran I Hasil Uji Autokorelasi	76
Lampiran J Hasil Uji Normalitas	76

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan proses perbaikan perekonomian dalam suatu masyarakat, sehingga membawa kemajuan dalam arti meningkatkan taraf hidup atau menyempurnakan mutu kehidupan dan masyarakat yang bersangkutan (Sukirno, 1982:13). Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, di samping itu akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2000 : 20). Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi merupakan dua tujuan pembangunan yang seharusnya dapat dicapai secara bersamaan dalam proses pembangunan ekonomi. Maka tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

Sesuai dengan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, secara konseptual pembangunan Indonesia dititik beratkan kepada pembangunan daerah. Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah, melalui pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di daerah, melalui pembangunan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan baik antar sektor maupun antar pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju kemandirian daerah dan kemajuan yang merata (Tambunan,2003 : 40). Namun pada perjalanannya pembangunan ekonomi baik dalam konteks negara maupun daerah kerap kali terjadi tidak merata dan secara spasial menimbulkan ketimpangan antar daerah. Ketimpangan antar daerah seringkali menjadi permasalahan serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat (Sutawijaya,2007:2)

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2002:42). Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat serta pertanggung jawaban kepada masyarakat (Mardiasmo, 2002:78). Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Mardiasmo 2002:89). Lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah adalah dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sesuai undang-undang setiap daerah mempunyai hak, kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan masyarakat dalam suatu daerah demi terbentuknya masyarakat sejahtera.

Diberlakukannya undang-undang otonomi daerah diharapkan pemerintah dapat menggali semua potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan guna menciptakan kemandirian daerah. Dalam menciptakan kemandirian daerah serta melaksanakan kewajiban daerah maka diperlukan adanya sumber pendapatan/penerimaan daerah. seperti uang dikemukakan oleh Sudantoko (2003:83) yaitu: “ semakin besar keuangan daerah , semakin besar pulalah kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya, atau dengan kata lain semakin besarlah kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat “.

Sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari retribusi, dimana retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam komponen pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti

bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan pengelolaan yang efisien. Keuangan daerah berasal dari penerimaan daerah yang terdiri atas bantuan pusat, pendapatan asli daerah (PAD) serta pendapatan lainnya yang sah. Bantuan tersebut berupa dana perimbangan yang terdiri dari pemerintah pusat. Rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dan tingginya sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat kemandirian dalam bidang keuangan untuk membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan masih rendah. Darumurti dan rauta (2000 : 49) mengemukakan implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah. Namun sisi lain sekaligus merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin bertambah urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan, antar lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan Jember, Bondowoso dan Situbondo yang berada di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur. Menilai kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari sejauhmana kemampuan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam membiayai berbagai pengeluarannya. Tetapi sejauh ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (Khusaini, 2006:153). Sebagai upaya untuk menciptakan kemandirian keuangan, mobilisasi PAD dapat dilakukan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi (Mindarti, 2002:4). Pola intensifikasi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan baik berupa pajak daerah, retribusi daerah, maupun badan usaha milik daerah, dan usaha-usaha lainnya yang sah. Sedangkan pola ekstensifikasi dapat dilakukan dengan melakukan perluasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Idealnya pola ini dilakukan dengan jalan mengembangkan sumber daya ekonomi daerah yang bersifat potensial agar lebih produktif.

Tabel 1.1 PAD Perkapita Kabupaten/Kota 2008-2013 (Juta Rupiah)

Kabupaten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jember	136.524	146.559	153.780	182.797	256.375	308.387
Bondowoso	35.371	40.120	49.663	66.816	77.846	79.559
Situbondo	31.708	31.450	46.679	61.861	67.050	78.043

Sumber : BPS Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo, 2014 (diolah)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang rencana tata ruang wilayah dalam pasal 9 menyatakan bahwa terdapat 9 satuan wilayah pengembangan. Satuan Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat SWP adalah suatu wilayah dengan satu dan atau semua kabupaten/kota-perkotaan didalamnya mempunyai hubungan hirarki yang terikat oleh sistem jaringan jalan sebagai prasarana perhubungan darat, dan atau yang terkait oleh sistem jaringan sungai atau perairan sebagai prasarana perhubungan air. Berdasarkan sistem pusat permukiman perkotaan pasal 9 paragraf 3 huruf c ada 9 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur, yaitu :

- a. SWP Gerbangkertosusila Plus meliputi: Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten' Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten dan Kota Pasuruan dengan pusat pelayanan di Kota Surabaya.
- b. SWP Malang Raya meliputi: Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, dengan pusat pelayanan di Kota Malang
- c. SWP Madiun dan sekitarnya meliputi: Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, dengan pusat pelayanan di Kota Madiun.
- d. SWP Kediri dan sekitarnya meliputi: Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung, dengan pusat pelayanan di Kota Kediri

- e. SWP Probolinggo-Lumajang meliputi: Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, dengan pusat pelayanan di Kota Probolinggo
- f. SWP Blitar meliputi: meliputi Kota Blitar dan Kabupaten Blitar, dengan pusat pelayanan Kota Blitar
- g. SWP Jember dan sekitarnya meliputi: Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Jember
- h. SWP Banyuwangi meliputi: Kabupaten Banyuwangi, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Banyuwangi
- i. SWP Madura dan Kepulauan meliputi: Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep dengan pusat pelayanan di Perkotaan Pamekasan.

Dari 9 SWP yang terbagi mempunyai peran dan fungsi wilayah yang berbeda Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Dengan pusat SWP sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, dan transportasi (Perda Jatim,2006). Dalam penelitian ini hanya menggunakan SWP Jember dan sekitarnya meliputi: Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Jember, karena letak administratif dan geografis wilayahnya yang hampir sama, suku dan budaya serta pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor dari sektor hortikultura dan pertanian. Sebelum terbentuknya SWP sebagai pembagian wilayah yang baru ketiga Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo telah sejak dulu menjadi Kabupaten yang telah bekerjasama dalam berbagai sektor. Maka dari itu penelitian ini menggunakan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur.

Tabel 1.2 PDRB Perkapita Kabupaten/Kota 2008-2013 (Juta Rupiah)

Kabupaten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jember	4.511.313	4.737.406	4.699.723	5.400.784	5.609.761	6.072.681
Bondowoso	3.884.808	4.023.967	4.284.447	4.484.202	4.769.346	5.022.071
Situbondo	4.942.081	5.179.011	5.438.468	5.742.593	6.074.840	6.452.619

Sumber : BPS Kabupaten Jemberr, Bondowoso, dan Situbondo, 2014 (diolah)

Berdasarkan data tersebut PDRB kawasa SWP IV Jawa Timur dari tahun 2008 sampai tahun 2013 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, Kabupaten Jember memiliki PDRB Perkapita 6.072.681; Kabupaten Bondowoso sebesar 5.022.071; dan Kabupaten Situbondo sebesar 6.452.619; kabupaten Bondowoso merupakan Kabupaten yang memiliki PDRB terendah pada tahun 2013. Kabupaten Situbondo mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di bandingkan dengan Kabupaten lainnya dalam SWP IV Jawa Timur. Apabila pertumbuhan ekonomi di SWP IV Jawa Timur mengalami penurunan dari tahun sebelumnya maka laju perekonomian di Jawa Timur juga akan mengalami penurunan begitu pula sebaliknya. Dan ini akan mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan (PDRB) antar wilayah.

Tabel 1.3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota 2008-2013 (Juta Rupiah)

Kabupaten	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jember	399,5	399,5	311,8	292,1	277,0	278,5
Bondowoso	152,6	152,6	131,9	123,6	117,2	115,3
Situbondo	108,9	108,9	105,2	98,6	93,5	90,3

Sumber : BPS Kabupaten Jemberr, Bondowoso, dan Situbondo, 2014 (diolah)

Dari perbedaan tingkat PAD dan PDRB antar Wilayah Satuan Pengembangan IV Jawa Timur maka akan menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan daerah yang akan merujuk kepada tingkat kemiskinan di antar wilayah Satuan Wilayah

Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti lebih lanjut tentang pengaruh ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah, yang dituangkan dalam skripsi dengan judul : “ *Pengaruh PDRB dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Stuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Propinsi Jawa Timur* “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur.
2. Bagaimana pengaruh PAD terhadap tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur.

1.3 Tujuan Peneiltian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

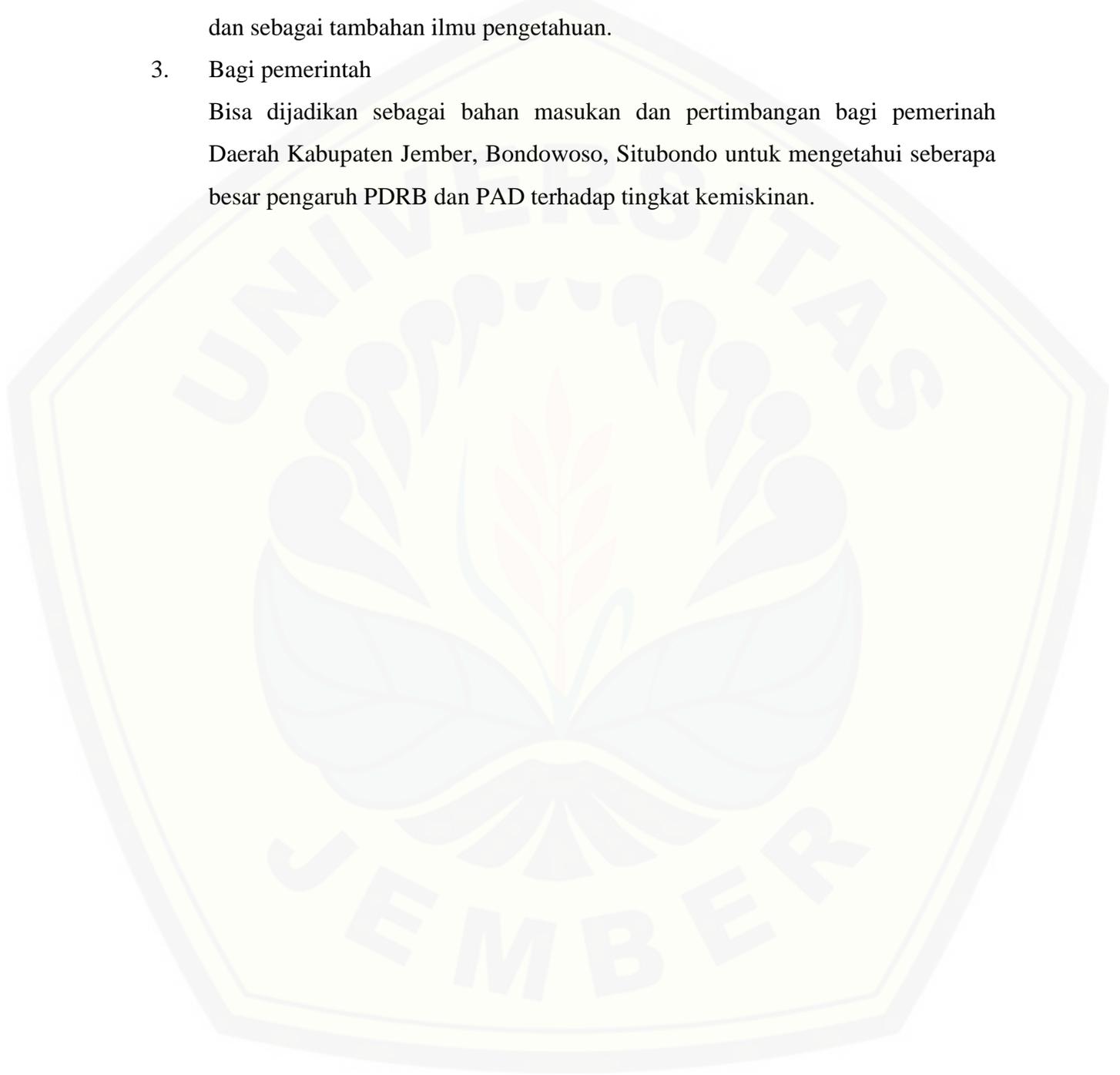
1. Bagi Penulis
Diharapkan dapat mendalami kajian dan wawasan tentang pendapatan yang ditinjau dari peranan dan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan.

2. Bagi akademisi

Dapat dijadikan suatu acuan pembelajaran untuk metode peneliiian selanjutnya dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan.

3. Bagi pemerintah

Bisa dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerinah Daerah Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB dan PAD terhadap tingkat kemiskinan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori pertumbuhan ekonomi

Samuelson (1997) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari *gross domestic product potensial* atau output dari suatu negara. Ada empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi, yaitu :

- 1) Sumber daya manusia, meliputi tenaga kerja, keterampilan, pengetahuan dan disiplin kerja. Hal ini merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. dalam dunia ekonomi unsur lain dalam produksi seperti barang – barang modal, bahan mentah dan teknologi dapat dibeli atau dipinjam. Sebuah negara mungkin dapat membeli peralatan telekomunikasi paling modern, meskipun demikian barang – barang modal tersebut hanya dapat digunakan secara efektif dan terawat bila sumber daya manusia terlatih dan terampil.
- 2) Pembentukan modal. Akumulasi modal, negara yang tumbuh dengan cepat cenderung untuk melakukan investasi besar – besaran pada barang modal baru, pada negara - negara yang pertumbuhannya paling cepat, 10 – 20 persen dari pendapatannya menjadi dana pembentukan modal. Modal bukan saja dalam bentuk computer, pabrik – pabrik namun banyak investasi yang hanya dilakukan oleh pemerintah dan terletak pada kerangka kerja untuk mendorong sektor swasta. Investasi ini disebut *Social Overhead Capital (SOC)* terdiri atas proyek – proyek skala besar yang mendorong perdagangan komersial, jalan-jalan, irigasi, proyek pengairan dan pelayanan kesehatan masyarakat adalah contoh penting. Seringkali proyek-proyek tersebut berkaitan dengan eksternal ekonomi, akan tetapi sektor swasta tidak dapat melakukannya, jadi pemerintah harus masuk dan menjamin bahwa investasi sosial atau infrastruktur itu dijalankan.
- 3) Sumber daya alam. Faktor produksi kedua adalah tanah. Sumber daya yang paling penting adalah tanah yang dapat ditanami, minyak, gas, hutan, air dan bahan mineral lain.
- 4) Perubahan teknologi dan inovasi. Sebagai tambahan bagi ketiga faktor klasik tersebut,

pertumbuhan ekonomi tergantung pada fungsi keempat yang vital yaitu teknologi. Dalam sejarah pertumbuhan bukan merupakan proses aplikasi yang sederhana, penambahan pabrik dan pekerja yang serupa satu sama lain.

Menurut Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi disini meliputi tiga aspek : 1) Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek ekonomi), suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. 2) pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output perkapita, dalam hal ini ada dua aspek penting, yaitu : output total dan jumlah penduduk. Output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. 3) Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan perspektif waktu, suatu perekonomian dikatakan tumbuh bila dalam jangka waktu yang cukup lama (lima tahun) mengalami kenaikan output perkapita. Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai masa sebelumnya. Menurut Sukirno, Sadono (2000) pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, harus diperbandingkan pendapatan nasional berbagai tahun yang dihitung berdasarkan harga konstan. Pertumbuhan ekonomi sangat diharapkan karena akan membuat masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa dalam jumlah besar dan juga penyediaan barang dan jasa sosial, sehingga hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi di wilayah tersebut (Tarigan, 2004 : 44). Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi), yang secara kasar bisa menggambarkan daerah tersebut.

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Adam Smith (1723-1790) seorang ahli ekonomi, dimana inti dari Smith tentang pertumbuhan ekonomi klasik adalah agar masyarakat diberi kebebasan yang seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi yang terbaik untuk dilakukannya.

Dan menyatakan bahwa pembangunan ekonomi sebagai proses pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi dengan memanfaatkan mekanisme pasar. Suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika mekanisme pasar berjalan baik dan sempurna. Peranan pemerintah hanya mengupayakan agar mekanisme pasar dapat berjalan baik, untuk itu yang harus dilakukan pemerintah adalah pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, dan penyediaan barang publik seperti pendidikan dan kesehatan (Ahkmad Mahyudi, 2004 : 165).

b. Teori pertumbuhan Neo-Klasik

Teori ini dikembangkan oleh Robert Solow (1970) dari Amerika Serikat dan T.W.Swan (1965) dari Australia dan Solow adalah ahli ekonomi yang memenangkan hadiah nobel pada tahun 1987. Solow berpendapat bahwa yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Djojohadikusumo, 1994). Selain Solow, Harrod-Domar dalam Adisasmita (2005) juga menekankan pentingnya peranan akumulasi modal dalam proses pertumbuhan. Teori yang dicetuskan Robert Solow tentang pertumbuhan ekonomi dimulai dengan melakukan asumsi dasar tentang neo-klasikal fungsi produksi dengan decreasing returns to capital. Dimana rates of saving dan pertumbuhan populasi adalah faktor yang eksogenus, kedua variabel menentukan kondisi steady-state level of income. Karena masing – masing negara memiliki tingkat saving dan pertumbuhan populasi yang berbeda, maka berbeda pula tingkat steady state di negara-negara tersebut. Semakin tinggi tingkat saving, semakin kaya negara tersebut dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan populasi, semakin miskinlah negara tersebut.

c. Teori Sistem Regional Harrod-Domar

Seorang ahli ekonomi yang berasal dari Inggris (1948) dan Evsey D. Domar (1957) yang mengembangkan teori ini pada waktu yang sama di Amerika (2000 : 65).

Teori ini didasarkan pada asumsi :

- a. Perekonomian bersifat tertutup.
- b. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap

- c. Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan, serta
- d. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Atas dasar asumsi tersebut Harrod-Domar membuat analisis bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar), bisa tercapai apabila memiliki syarat-syarat keseimbangan berikut :

$$g = k = n,$$

Dimana :

- g : growth (tingkat pertumbuhan output)
- k : capital (tingkat pertumbuhan modal)
- n : tingkat pertumbuhan angkatan kerja

2.1.2 Teori Kemiskinan

Chambers (dalam Chriswardani, 2005:35) mengatakan kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu : 1) kemiskinan (poverty), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Menurut Sallatang (1986:55) kemiskinan adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan pemilikan kekayaan material, tanpa mengabaikan standart atau ukuran-ukuran fisiologis, dan sosial. Kemiskinan tersebut merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standart minimum atau ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran (Kuncoro, 1997:103). Dimensi ekonomi dapat diukur dengan nilai rupiah meskipun harganya bisa berubah ubah setiap tahunnya tergantung pada tingkat inflasi rupiah (Ellies, 1994: 132). Boediono (dalam Kuncoro 2004) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessery condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan (Hapsoro, 2013).

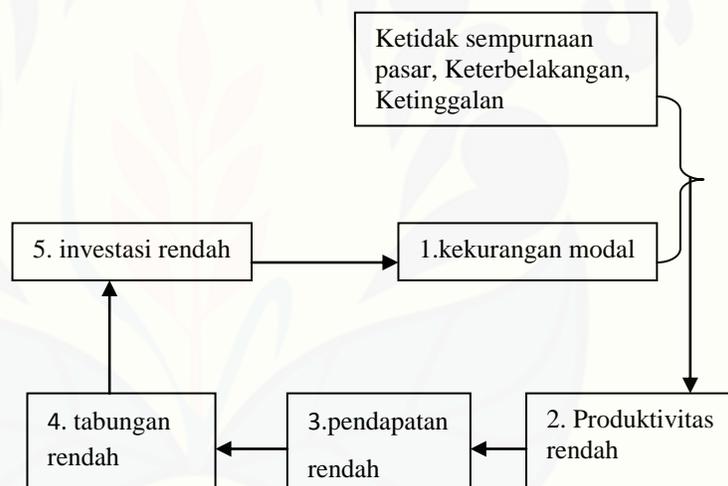
Menurut Basri (1995:102) kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan kekurangan dalam memenuhi sejumlah kebutuhan, seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan pengetahuan. Sedangkan menurut Kuncoro (1997: 103) bahwa kemiskinan merupakan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standart minimum atau ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran. Dari pendapat diatas kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok (utama), yang di akibatkan oleh sampingan dari suatu kebijakan yang tidak dapat dihindari, merupakan akar kemiskinan yang mengakibatkan ketidak berdayaan penduduk lapisan masyarakat bawah, sehingga membawa pada gejala kemiskinan yang bersifat multidimensional, karena dalam kenyataannya berurusan juga dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, dan politik), dan juga adanya suatu kebudayaan kemiskinan yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Ukuran kemiskinan menurut Nurkse (1953) dalam Kuncoro, (1997) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: (Anonymous, 2012) Kemiskinan Absolut, Relatif dan Kultural.

2.1.3 Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000: 107), yaitu :

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya dalam penerapan teknologi, ditandai oleh rendahnya penggunaan input mekanisme yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin yang hanya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka ketergantungan, rendahnya tingkat kesehatan, kurangnya pekerjaan alternatif, rendahnya etos kerja, rendahnya keterampilan dan besarnya jumlah anggota keluarga.

Menurut Nurkse (1953) (dalam Kuncoro, 1997: 107) penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik (Hasporo, 2013). Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi (Kuncoro, 1997:107).



Gambar 2.1: Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*)

Sumber : Kuncoro, (2000: 107)

Cara memutuskan lingkaran setan kemiskinan dalam pembangunan adalah dengan ada kerjasama masyarakat, Negara dan pemerintah dalam mengatasi masalah ini.

Cara pertama yang harus dilakukan adalah dengan memberikan tingkat pendidikan yang bermutu kepada masyarakat. Dengan ada pendidikan yang tinggi maka akan tercipta tenaga kerja ahli dan itu akan membantu negara sedang berkembang dalam mengelola kekayaan alam mereka sendiri tanpa melibatkan negara asing. Cara kedua adalah pemerintah harus memberikan bantuan modal kepada

pengusaha kecil, agar pengusaha kecil bisa mengembangkan usahanya dan juga dapat menciptakan produk-produk yang berkualitas agar bisa bersaing dengan produk negara asing. Cara ketiga, negara sedang berkembang harus menghapuskan budaya korupsi, karena budaya itu merupakan factor yang juga berperan penting dalam terciptanya lingkaran setan kemiskinan pembangunan. Cara keempat, pemerintah tidak menyerahkan kekayaan alam kepada investasi asing. Cara kelima, pemerintah jangan berhutang lagi kepada Negara maju sebab semua itu tidak membantu dalam menyejahterakan masyarakat. Hutang hanya menambah beban bagi negara sedang berkembang sehingga negara tidak mampu membayar. Dan itu akan menambah derita kemiskinan bagi Negara sedang berkembang.

2.1.4 Ukuran dan Ciri-Ciri Kemiskinan

Menurut Sayogyo (dalam Kuncoro, 1997:116) tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah, pengeluaran rumah tangga yang disertakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan di bagi wilayah pedesaan dan perkotaan. Sayogyo mendefinisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi perkapita setahun yang sama dengan beras. Dengan menerapkan garis kemiskinan ini dalam data SUSENAS dari tahun 1976 sampai dengan 1987 akan diperoleh persentase penduduk yang hidup di bawah kemiskinan daerah pedesaan yaitu :

1. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
2. Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
3. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Persentase penduduk miskin yang hidup dibawah kemiskinan daerah perkotaan yaitu:

1. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
2. Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
3. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik 2008), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan.

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember dapat dilihat dari ciri-ciri di bawah ini :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
3. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
4. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari kayu / rumbia /kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai / air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari – hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

9. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
12. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000 seperti sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD.
14. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 0.5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000 per bulan. Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pendapatan seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1 per hari masuk dalam kategori miskin (Criswardani, 2005:41).

2.1.5 Pemerintahan daerah

Menurut Undang-Undang No.Tahun 1974 (Kuncoro,2004: 15) pelaksanaan ekonomi daerah terletak pada tingkat II. Maka dari itu daerah tingkat II diberi keleluasaan mengatur rumah tangganya sendiri. Berikut ini akan dijelaskan mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Soehino,2000:224), yaitu:

a. **Asas Desentralisasi**

Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada otonom dalam rangka negara kesatuan republik indonesia. Dalam hal ini prakarsa diserahkan kepada daerah, baik menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun segi pembiayaan dan perangkat.

b. **Asas Dekonsentrasi**

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah. Tanggung jawab dalam asas ini berada pada pemerintah pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun

pembiayaan. Unsur pelaksanaannya adalah instansi-instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh daerah dalam kedudukannya selaku perangkat pemerintah pusat.

c. Tugas Pembantuan

Penugasan dari pemerintah pusat ke daerah, dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban memberikan laporan dari hasil pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Penerapan sistem pembagian untuk menetapkan bidang yang menjadi urusan dan wewenang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Kaho, 1998: 15): 1). Sistem Residu, tugas-tugas menjadi wewenang pemerintah pusat ditentukan terlebih dahulu, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah 2). Sistem Formal, tugas-tugas pemerintah dalam rumah tangga daerah tidak secara apriori ditetapkan di dalam perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya. Tetapi tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus pemerintah pusat atau daerah yang lebih tinggi. 3). Sistem Otonomi Riil, penyerahan urusan tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan faktor yang nyata sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat, serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. 4). Sistem Material, tugas-tugas daerah ditetapkan satu per satu secara limitatif atau terinci, dan diluar dari tugas yang telah ditentukan merupakan urusan pemerintah pusat. 5). Prinsip Otonomi Nyata, Dinamis dan Bertanggung jawab merupakan satu variasi dari sistem otonomi riil dimana penyerahan urusan-urusan kepada daerah dilakukan secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

2.1.6 Keuangan daerah

Mamesah (1995: 16) keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu yang baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tujuan utama pengelolaan keuangan

daerah, yaitu (1) tanggung jawab, (2) memenuhi kewajiban keuangan, (3) kejujuran, (4) Hasil guna, dan (5) pengendalian. Dalam rangka pemberdayaan pemerintah daerah saat ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2002: 3) :

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented). Hal tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat (DPRD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan daerah.
2. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta dari partisipasi yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekda dan perangkat daerah lainnya.
3. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran pada khususnya.
4. Kejelasan hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas.
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah, dan PNS, baik rasio maupun pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan.
7. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akutan publik dan pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
8. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
9. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan komitmen pemerintah daerah terhadap

penyebarluasan informasi, sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

10. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang-barang daerah yang lebih profesional.

2.1.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mudrajad Kuncoro (2004: 13-14) ada lima penyebab utama rendahnya PAD yang menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat. Pertama, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Kedua, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Ketiga, kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan. Keempat, faktor penyebab ketergantungan fiskal ini bersifat politis, sehingga dikhawatirkan apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme. Faktor kelima penyebab ketergantungan adalah “kelemahan” dalam pemberian subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Karena itu solusi yang ditawarkan adalah: (1) Meningkatkan peran BUMD; (2) Meningkatkan penerimaan daerah; (3) Mengubah pola pemberian subsidi; dan (4) Meningkatkan pinjaman daerah.

PAD dapat memberikan warna tersendiri terhadap tingkat otonomi suatu daerah, serta jenis pendapatan ini dapat digunakan secara bebas oleh daerah (Kaho, 1998: 68). Menurut pasal 79 UU No.32 Tahun 2004 sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :

1. Hasil pajak dan retribusi daerah
2. Hasil perusahaan milik daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, a) Dana perimbangan, b) Pinjaman daerah, c) Pendapatan daerah lain-lain yang sah.

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan sumber

keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil yang pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan untuk daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Sejalan dengan pengertian PAD jika adanya peningkatan PAD suatu daerah maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi sebelumnya dan akan menurunkan tingkat kemiskinan suatu daerah walaupun indikator sebagai pengukur tingkat kenaikan pertumbuhan ekonomi adalah PDRB.

2.1.8 Teori Pendapatan

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata di suatu wilayah yang diperoleh dengan cara membagi antara pendapatan daerah regional bruto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah tersebut juga akan meningkat. Maka dari itu pendapatan perkapita suatu daerah seringkali digunakan sebagai ukuran dari keberhasilan suatu daerah untuk menciptakan pembangunan yang meningkat. Menurut Partadireja,(1989: 29) data tentang pendapatan perkapita suatu daerah mempunyai kegunaan antara lain :

1. Mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian suatu daerah: Dari perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diketahui apakah suatu daerah merupakan daerah pertanian, industri, perdagangan atau jasa. Dengan adanya perhitungan tersebut dapat diketahui ke arah mana perekonomian suatu daerah akan bergerak dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang di tetapkan.

2. Membandingkan perekonomian suatu daerah: Pendapatan perkapita menjadi dasar erbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat dan laju pembangunan ekonomi suatu daerah. Pendapatan perkapita suatu daerah merupakan hasil bagi antara PDRB pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama.
3. Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu: Perhitungan PDRB angka yang dicatat merupakan penjumlahan angka-angka selama jangka waktu tertentu. Perbandingan waktu dapat memberikan gambaran mengenai terjadinya kenaikan atau penurunan mengenai produk-produk yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Dengan adanya perbandingan antara hasil produksi suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut akan diketahui pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah.

2.1.9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut, sehingga membuat besaran PDRB setiap daerah berbeda-beda. Perhitungan PDRB dilihat dari berbagai sektor dan sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa (Cholili, 2014).

Jenis PDRB dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu : (1) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga yang berlaku, yaitu nilai produk atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, (2) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan, yaitu jumlah nilai produk atau pengeluaran pendapatan yang dinilai atas dasar harga konstan pada tahun

tertentu. Tiga metode yang digunakan untuk menghitung PDRB (Patadireja, 1989:33), yaitu :

1. Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi (production approach), Menghitung PDRB dengan cara menjumlahkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi yang tercipta dari sektor-sektor perekonomian di dalam suatu daerah selama periode tertentu. Cara ini yang dihitung adalah nilai produksi yang diciptakan oleh faktor-faktor produksi yang ada disuatu daerah, tanpa membedakan apakah faktor produksi itu milik orang luar daerah atau warga daerah itu sendiri.
2. Metode perhitungan PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran (expenditure approach). Menghitung PDRB dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk kondisi rumah tangga dan lembaga sosial swasta yang tidak mencari keuntungan, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto disuatu daerah selama jangka waktu tertentu.
3. Metode perhitungan PDRB berdasarkan pendekatan pendapatan (income approach). Menghitung PDRB dengan cara menjumlah seluruh pendapatan lapisan masyarakat suatu masyarakat suatu wilayah atau region suatu periode tertentu, dimana pendapatan tersebut diperoleh dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki.

PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. hal ini sejalan dengan Bapenas (2003) yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB. Angka PDRB atas harga konstan yaitu PDRB yang sudah mengeliminasi faktor inflasi, jadi untuk melihat kenaikan pendapatan yang riil adalah PDRB atas harga konstan. Jika PDRB naik maka pertumbuhan naik dan kemiskinan akan berkurang, tingginya tingkat PDRB akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang kemiskinan di berbagai negara telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan daerah dan periode waktu yang berbeda pula, antara lain :

Menurut Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) tentang jurnalnya yang meneliti tentang dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin dengan menggunakan analisis deskriptif dan ekonometrika dengan metode data panel. Hasil penelitiannya yaitu bagaimana menganalisis tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, hal ini dilakukan karena jumlah penduduk miskin akibat krisis belum berhasil dikurangi bahkan cenderung meningkat. Penelitian ini menggunakan data panel dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan, PDRB, tingkat inflasi, jumlah lulusan tingkat smp, sma, agrishare, industri share, dan dummy krisis. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang mampu mengurangi kemiskinan suatu daerah melainkan efek kebawah (*tickle down effect*).

Saputra Wisnu Adhi (2011) meneliti tentang analisis prngaruh jumlah penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dengan hasil penelitiannya yaitu jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, PDRB dan IPM mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Tengah disebabkan karena pengaruh jumlah penduduk yang terus meningkat yang tidak diikuti dengan kebijakan pemerintah yang terus meningkat dalam upaya menekan angka kelahiran, namun tingkat kemiskinan dapat ditekan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia dengan meningkatkan sarana prasarana baik dari pendidikan, kesehatan ataupun sosial yang terjadi di Kabupaten/ Kota Jawa Tengah.

Hapsoro (2013) meneliti tentang Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Regional terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan (Studi Kasus 44 Kota di Indonesia tahun 2007-2010). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa panel data, terdiri dari data *time series* selama periode 2007-2010 dan data *cross section* 44 kota di Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan untuk mengestimasi data panel ialah *Fixed Effect Model* (FEM), dengan memasukkan variabel *dummy* dalam persamaan atau disebut juga dengan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Variabel *dummy* wilayah digunakan dalam model penelitian ini karena adanya perbedaan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, variabel pengangguran dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga, PDRB, pengangguran, dan inflasi layak menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan perkotaan.

Menurut Van Indar Wiguna (2013) pada jurnal tentang analisis pengaruh PDRB, Pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2005-2010 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode data panel melalui pendekatan efek tetap (*fix effect model*) dengan *eviews 6*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan karena peningkatan PDRB dan peningkatan angka melek huruf di Jawa Tengah, namun pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan hal ini terjadi karena peningkatan pengangguran diikuti peningkatan kemiskinan.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

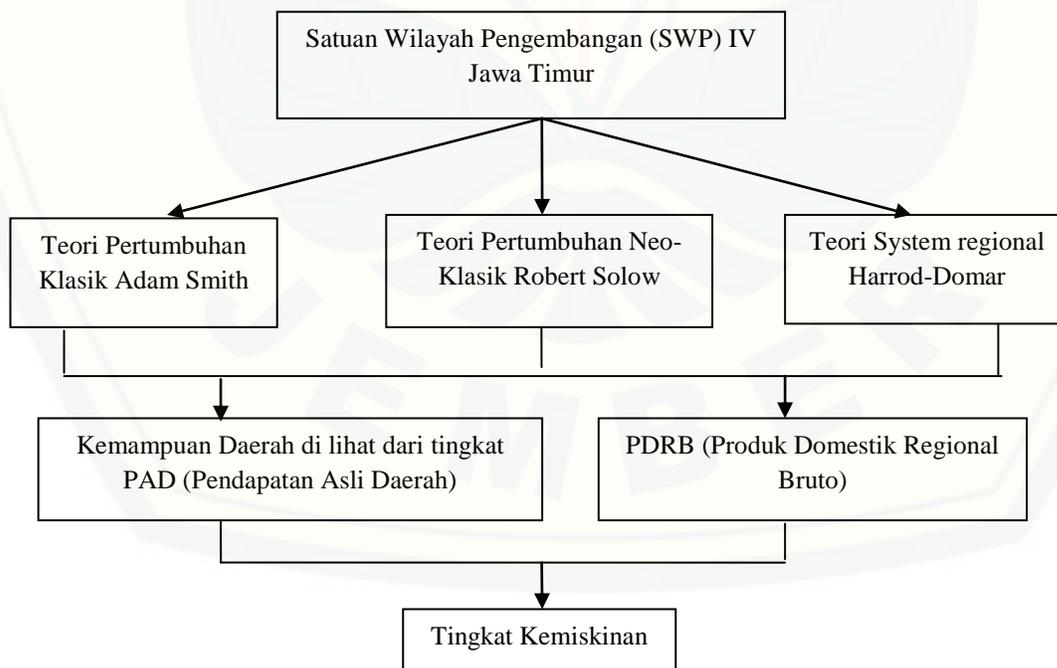
No	Nama	Judul	Alat Analiais	Hasil penelitian
1.	Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008)	Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin.	analisis Deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data	Penelitiannya menganalisis tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia..
2.	Saputra Wisnu Adhi (2011)	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.	Metode yang digunakan adalah data panel dengan menggunakan program Eviews 4.1.	a) variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. b) Variabelpengangguran memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
3.	Dody Nursetyo Yekti Hapsoro (2013)	Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Regional terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan (Studi Kasus 44 Kota di Indonesia tahun 2007-2010)	Penelitian menggunakan data panel dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM)	a) PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. b) Variabel pengangguran dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
4.	Van Indar Wiguna (2013) jurnal	Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010	analisis regresi linier berganda menggunakan panel data dan melalui pendekatan efek tetap (<i>Fixed Effect Model</i>) dengan bantuan <i>software E-Views 6</i>	a) Variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. b) Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Sumber : Hasil olahan pribadi

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat sedikit kesamaan mengenai alat analisis yang digunakan dan variabel, sehingga ada beberapa hasil yang menunjukkan kesamaan. Seperti penelitian dari Saputra Wisnu Adhi (2011) dan Van Indar Wiguna (2013) dimana alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan panel data dan PDRB sebagai variabel independent yang digunakan dan hasil penelitian yang sama yaitu PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Tetapi ada perbedaan dimana PAD bernilai negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dan perbedaan berikutnya yaitu tempat penelitian dan tahun yang digunakan sebagai dasar penelitian dilakukan oleh masing masing peneliti.

2.3 Kerangka Konseptual

Pengelolaan dana PAD dan PDRB suatu wilayah daerah memang perlu pengelolaan yang sesuai, agar distribusi kepada masyarakat dan daerah bisa berjalan lancar. Kerangka konseptual ini ingin mengetahui seberapa besar pengaruh PAD dan PDRB Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur terhadap pengaruh tingkat kemiskinan, adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Pengaruh PAD dan PDRB Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur terhadap pengaruh tingkat kemiskinan.

Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas bahwa wilayah yang akan diteliti adalah Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Dari ketiga Kabupaten yang berada dala Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Propinsi Jawa Timur terlebih dahulu akan di cari tingkat PDRB, PAD tingkat kemiskinan yang diperoleh dari penduduk sejatera dan prasejahtera dan juga jumlah penduduk miskin tiap Kabupaten. Sehingga akan ada beberapa wilayah yang mengalami perbedaan dilihat dari tingkat kemiskinannya.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur, dapat di susun hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan dengan elastisitas negatif terhadap tingkat kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur.
2. Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dengan elastisitas negatif terhadap tingkat kemiskinan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap suatu permasalahan berupa fakta-fakta suatu populasi dan pada umumnya penelitian ini berasal dari individu, kelompok maupun organisasional. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada teori-teori melalui pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo 2002 : 13). Jenis penelitian yang digunakan adalah metode explanatory yaitu menjelaskan hubungan kasual antara variabel-variabel bebas dan variabel-variabel terikat serta pengaruh antara dua variabel atau lebih melalui pengujian hipotesa (Sugiyono, 2012:11).

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat kemiskinan yang berada di Satuan wilayah pengembangan (SWP) IVJawa Timur periode tahun 2000-2013.

3.1.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IVJawa Timur yaitu periode tahun 2000-2013. Penelitian dilakukan karena melihat tingginya tingkat kemiskinan yang di Jawa Timur beberapa tahun dan menjadi terbesar nomor tiga di pulau jawa dan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IVJawa Timur menjadi objek penelitian untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kemiskinan yang terjadi di Jawa Timur dilihat dari Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IVJawa Timur.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan (Daryanto, Arif dan Yundy H, 2005: 15) Adapun data sekunder dalam penelitian ini:

- a. Tingkat kemiskinan dari menurut Kabupaten/Kota yang berada dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur pada periode 13 tahun terakhir 2000-2013 dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 menurut Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur periode 13 tahun terakhir 2000-2013 dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur periode 13 tahun terakhir 2000-2013 dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini melalui kepustakaan data sekunder yang telah dikumpulkan oleh instansi dan badan tertentu yang telah tersusun dengan baik dan siap diolah dari berbagai sumber yang di kaji pada Kabupaten masing-masing wilayah yang termasuk pada kawasan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur pada periode 13 tahun terakhir 2000-2013 dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Analisis Regresi Panel Data

Untuk mengetahui pengaruh PDRB dan PAD terhadap tingkat kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur digunakan Analisis Regresi Linier Berganda (multiple linear regression method) dengan model data panel. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time-series data*) dan kerat lintang (*cross-section data*). Gujarati (2003) menyatakan bahwa untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama di survey dalam beberapa waktu dalam model panel data. Dan salah satu manfaat yang paling banyak dirasakan oleh para ahli ekonomi dalam penggunaan data panel adalah mengatasi masalah kekurangan data yang tidak dapat dipenuhi oleh data *time series* (Daryanto dan Hafizrianda, 2010:86). Dengan persamaan model:

$$Y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + e$$

Keterangan:

Y	= Kemiskinan
b ₀	= Konstanta
b ₁	= Koefisien dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
b ₂	= Koefisien dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X ₁	= Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
X ₂	= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
e	= Variabel pengganggu

Menurut Hsiao, 1986 (dikutip dari Firmansyah, 2009) keunggulan penggunaan data panel dibandingkan deret waktu dan kerat lintang adalah :

- a. Dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan *degrees of freedom* (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, dimana dapat menghasilkan ekonometri yang efisien.
- b. Dengan panel data, data lebih informatif, lebih bervariasi, yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* dan *time series* saja.
- c. Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

Dalam model data panel dikenal ada dua pendekatan yaitu: Fixed Effect, dan Random Effect.

1) Pendekatan Fixed Effect

Model *Fixed Effect* (FEM) adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar individu dan waktu (Widarjono, 2013:356-357). Salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam panel data adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit (*cross section*) maupun antar waktu (*timeseries*). Dalam pendekatan Fixed Effect menggunakan uji F statistik. Adapun uji F statistiknya adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{SSR_R - SSR_U / q}{\frac{SSR_U}{(n-k)}} \dots \dots \dots (3.1)$$

dimana SSR_R dan SSR_U merupakan *sum of square residual* teknik tanpa variabel dummy yaitu sebagai *restricted model* dan teknik fixed effect dengan variabel dummy sebagai *unretrcted model* (Widarjono, 2013:362).

2) Pendekatan Random Effect

Model Random Effect akan mengistemasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Nama metode Random Effect berasal dari pengertian bahwa variabel gangguan v_{it} terdiri dari dua komponen yaitu variabel gangguan secara menyeluruh e_{it} yaitu kombinasi time series dan cross section dan variabel gangguan antar individu e_{it} . Dalam hal ini, variabel gangguan μ_i adalah berbeda-beda antar individu tetapi tetap antar waktu (Widarjono, 2013:360).

Uji signifikasi model random Effect didasarkan kepada nilai residual dari metode OLS. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut (Widarjono, 2013:363) :

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (\sum_{t=1}^T \hat{e}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}^2} - 1 \right)^2$$

$$= \frac{nT}{2(T-1)} \left(\frac{\sum_{i=1}^n (\sum_{t=1}^T \hat{e}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}^2} - 1 \right)^2 \dots\dots\dots (3.2)$$

dimana n = jumlah individu; F = Jumlah periode waktu dan \hat{e} adalah residual metode OLS.

Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar nilai kritis statistik *chi-squares* maka hipotesis nol ditolak. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik *chi-squares* sebagai nilai kritis maka hipotesis nol diterima. Hapsoro (2013) dalam model data panel, persamaan dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots (3.3)$$

dimana N merupakan data *cross section*.

Sedangkan persamaan model dengan *time series* dapat ditulis:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \epsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T \quad \dots\dots\dots (3.4)$$

dimana T merupakan banyaknya data *time series*.

Dikarenakan data panel merupakan penggabungan dari data *time series* dan *data cross section*, maka persamaannya ditulis menjadi:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \epsilon_{it} ; i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T \quad \dots\dots\dots (3.5)$$

Dimana:

- N : banyak observasi
- T : banyaknya waktu
- NxT : banyaknya data panel

Model dasar dalam penelitian ini merujuk pada model yang pernah digunakan dalam penelitian Hapsoro (2013), dan Firdausi (2010). Model dalam penelitian ini merumuskan bahwa kemiskinan merupakan fungsi dari PDRB dan PAD.

$$TK = f(PDRB_{it}, PAD_{it}) \dots\dots\dots (3.6)$$

Model dasar persamaan (3.4) diturunkan menjadi model ekonometrik sebagai berikut:

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 PAD_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots (3.7)$$

Selanjutnya fungsi regresi tersebut ditransformasikan dalam bentuk semi logaritma (Log) sebagai berikut (Sipayung, 2013).

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 LPDRB_{it} + \beta_2 PAD_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots (3.8)$$

Dimana:

- TK = Tingkat Kemiskinan Kabupaten
- LPDRB = Logaritma PDRB Kabupaten
- PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
- i = Kabupaten

t = waktu (2000-2013)
 β_0 = konstanta

3) Uji Pendekatan Data Panel (Hausman Test)

Uji statistik Hausman mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak jumlah variasi independen. Jika H_0 ditolak, nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah FEM (Chi square hitung \geq Chi square tabel dan probabilitas hitung $\leq \alpha = 5\%$), sedangkan sebaliknya jika H_0 diterima pada saat nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah REM (Chi square hitung \leq Chi square tabel dan probabilitas hitung $\geq \alpha = 5\%$) (Widarjono, 2013:365). Untuk menguji apakah lebih baik FEM atau REM dalam persamaan data panel maka menggunakan uji Hausman (Daryanto dan Hafizrianda, 2010:89-90). Hipotesa sebagai berikut:

$H_0 = \text{random effect}$ lebih baik daripada fixed effect

$H_1 = \text{fixed effect}$ lebih baik daripada random effect

Uji Hausman akan signifikan apabila nilai probabilitasnya kurang dari taraf nyata, sehingga H_0 ditolak dengan artian FEM akan lebih baik dari REM.

3.6 Uji Statistik

Secara statistik ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual dapat diukur dari nilai statistik t , nilai statistik F serta koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima. Pengujian hipotesis menggunakan analisis data panel (*pooled data*) yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual, t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Hal ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada *level of significant 5%* dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1. $H_0 : b_1 = 0$ tidak ada pengaruh antara variabel laju pertumbuhan PDRB dengan tingkat kemiskinan
 $H_1 : b_1 \leq 0$ ada pengaruh negatif antara variabel laju pertumbuhan PDRB dengan tingkat kemiskinan
2. $H_0 : b_2 = 0$ tidak ada pengaruh antara variabel PAD dengan tingkat kemiskinan
 $H_1 : b_2 < 0$ ada pengaruh negatif antara variabel PAD dengan tingkat kemiskinan.

Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus:

$$t = \frac{\beta_i - \beta_i^*}{SE(\beta_i)} \dots\dots\dots (3.9)$$

Dimana:

- β_i = parameter yang diestimasi
- β_i^* = nilai hipotesis dari β_i ($H_0 : \beta_i = \beta_i^*$)
- $SE(\beta_i)$ = simpangan baku β_i dari independen ke-i

Sedangkan nilai t tabel dapat dicari dengan rumus:

$$t_{tabel} = (\alpha ; df), df = n - k$$

Dimana:

- α = 0,05
- n = jumlah observasi
- k = jumlah variabel independen

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Jika $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b. Jika $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

3.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara serentak (simultan). Pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada *level of significant 5%* dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_k = 0$ artinya tidak ada pengaruh signifikan antar semua variabel variabel independen dengan variabel dependen.
2. $H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \beta_k = 0$ artinya ada pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/(k - 1)}{1 - R^2/(N - 1)}$$

Dimana:

- k = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta
 N = jumlah observasi

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut (Gujarati, 2010:309) :

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F\text{ hitung} \leq \alpha$, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.

2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila F hitung $\geq \alpha$, yang artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

3.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan pengujian (R^2) ini untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antaranol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen yang dirumuskan dengan model $0 \leq R^2 \leq 1$.

3.5 Uji Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan model yang secara teoritis maka suatu proses harus memenuhi beberapa asumsi klasik. Ada empat uji asumsi klasik yang harus dilakukan terhadap suatu model regresi, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokolerasi (Hapsoro, 2013) antara lain:

3.5.1 Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas memiliki pengertian bahwa ada hubungan linear yang pasti diantara beberapa atau semua variabel independen (variabel yang menjelaskan) dari model regresi. Konsekuensi adanya multikolinearitas adalah koefisien regresi variabel tidak tentu dan kesalahan menjadi tidak terhingga. Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Munculnya multikoleniritas jika nilai R^2 tinggi dan nilai t semua variabel penjelas tidak signifikan, serta nilai F tinggi dan untuk menguji koefisien korelasi antar variabel

independen yaitu jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga terdapat multikolinieritas dalam model. Sebaliknya, jika koefisien korelasi rendah di bawah 0,85 maka model tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas (Widajono, 2013:104).

3.5.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji dalam model regresi linear terdapat korelasi antara faktor pengganggu pada periode waktu atau ruang tertentu dengan faktor pengganggu pada waktu atau ruang sebelumnya. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bias digunakan yakni Uji Park, Uji Glesjer atau Uji White. Menguji heterokedastisitas dilakukan dengan metode General Least Square (GLS) dimana membandingkan sum square pada weight statistic dengan sum square unweight statistic. Jika t-statistik \geq t-tabel atau nilai Prob $\leq \alpha = 5$ persen maka ada heterokedastisitas, sedangkan bila t-statistik \leq t-tabel atau nilai Prob $\geq \alpha = 5$ persen maka tidak ada heterokedastisitas (Wijayanto, 2010).

3.5.3 Uji Autokorelasi

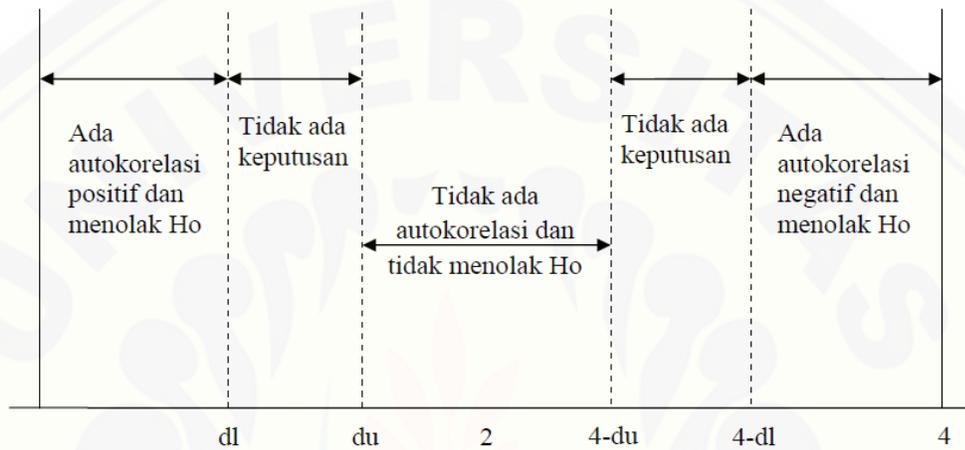
Uji autokorelasi digunakan menguji dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara gangguan ui pada periode t dengan gangguan ui pada periode t-1. Akibat adanya autokorelasi adalah parameter yang diamati menjadi bias dan variannya tidak minimum, sehingga tidak efisien. (Gujarati, 2003 dalam Kumalsari 2011). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan uji formal dan informal. Di bawah ini adalah kriteria uji *DW-statistics* untuk melihat gejala autokorelasi:

Tabel 3.1 Kriteria Pengujian Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$

Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d_l < d < d_u$
Ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-d_u < d < 4-d_l$
Tidak ada autokorelasi	Terima	$d_u < d < 4-d_u$

Sumber: Imam Gozali dalam Wijayanto, 2012



Gambar 3.1 Aturan membandingkan Uji Durbin Watson dengan Tabel Durbin Watson
(Sumber:Imam Gozali dalam Wijayanto, 2012)

3.5.4 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain J-B Test dan metode grafik. Penelitian ini menggunakan metode J-B test yang dilakukan dengan menghitung nilai skewness dan kurtosis, apabila nilai J-B tidak signifikan (lebih kecil dari 2), maka data berdistribusi normal dan bila probabilitasnya > 5 persen, maka data berdistribusi normal (Winarno, 2009 dalam Hapsoro 2013).

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel ini memberikan batasan-batasan penelitian sehingga dapat menyamakan persepsi antar peneliti dan pembaca agar tidak berada diluar jalur pembahasan, pengertian tersebut berupa :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (bps : 2008). PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas harga konstan menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2000-2013, dinyatakan dalam jutaan rupiah.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil yang pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dalam penelitian ini data PAD yang digunakan adalah menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2000-2013, dinyatakan dalam jutaan rupiah.

3. Tingkat Kemiskinan

kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan kekurangan dalam memenuhi sejumlah kebutuhan, seperti papan, sandang, pangan, pekerjaan, pengetahuan dan merupakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan standart minimum atau ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran. Kemiskinan bisa dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan, keluarga sejahtera pra sejahtera, luas tanah (bangunan) rumah, pola konsumsi dan tabungan (investasi) rendah. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah tingkat kemiskinan menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2000-2013, dimana data merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk total wilayah kabupaten/kota dalam satuan ribu (000).